

## ABSTRAK

Lilis Sopianti: *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Siyasah Maliyah ( studi Kasus Di Jalan Kapten Halim Pasar Rebo)*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan dasar peraturan di daerah, sebagaimana Peraturan Daerah pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat salah satu kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah tersebut memberkan keleluasaan usaha pemberdayaan sumber pemasukan keuangan secara maksimal dengan beban tanggungjawab kepada daerah masing-masing, salah satunya untuk retribusi parkir

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purwakarta dan bagaimana perspektif Siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purwakarta

Penelitian ini bertolak dari pemikiran Atjep Djazuli bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian tentang pengelolaan sumber-sumber keuangan yang menuntut pengaturan Siyasah adalah Siyasah Maliyah yang memiliki sumber hukum normatif yaitu al-Qur'an, as-Sunnah serta kaidah-kaidah Fiqh Siyasah. Siyasah Maliyah berfungsi untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber keuangan Negara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu penghitungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, pengamatan dan studi kepustakaan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidaktetapan pendapatan yang dihasilkan dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purwakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 sampai 2012 bukan prestasi dari suatu pemerintahan. Oleh sebab itu untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serta tanggungjawab maka kebijakan pemerintah daerah harus direalisasikan dengan tujuan syariat Islam dan sejalan dengan *Hifdzul Mal* serta prinsip-prinsip Siyasah Maliyah yaitu prinsip keadilan, *mashlahah murshalah*, dan prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*